Analisis Kebijakan Pengendalian Pelaku Hoax dan Ujaran Kebencian

Analysis of Hoax and Players Control Policies Hate Speech

Fauziah Lubis*

Jurusan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 19 November 2019; Disetujui: 16 Desember 2019; Diterbitkan: 6 Januari 2020.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pengendalian berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian berdasarkan Undang Undang Nomor 11 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa ketentuan lainnya. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan. Disamping itu, juga menelaah sumber-sumber buku teks, buku jurnal di perpustakaan untuk dukungan data dan informasi dalam menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar kebijakan tentang penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian yang telah diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2 sudah berjalan efektif karena dapat membatasi ruang gerak para pelaku penyebar berita hoaks dan ujaran kebencian. Lebih khusus, pelaku bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*Hate Speech*). Disamping itu, semakin pesat dan berkembangnya teknologi digital dewasa ini, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (Hoax) yang sedang marak terjadi. Sebanyak 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu.

Kata Kunci: Kebijakan, Hoax, Ujaran Kencian

Abstract

This study aims to review and analyze the policy of controlling fake news or hoaxes and expressions of hatred based on Law Number 11 which has been changed to Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions as well as several other provisions. This research method is a qualitative research method by analyzing a statutory regulation. Besides that, it also examines the sources of textbooks, journal books in the library to support data and information in analyzing. The results of this study indicate that the basic policy regarding the dissemination of false news or hoaxes and Hate Speech that has been regulated in Law Number 19 Year 2016 article 28 paragraphs 1 and 2 has been effective because it can limit the space for the perpetrators of hoaks and Hate Speech. More specifically, the perpetrators can be charged with other related articles namely article 311 and 378 of the Criminal Code, Article 27 paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, as well as the perpetrators of spreading false news may also be subject to articles related to Hate Speech. Besides that, the more rapid and development of digital technology today, the more diverse the new crimes committed through this digital media, in this case the spread of false news (Hoax) that is rife. As many as 800,000 sites in Indonesia have been indicated as spreading false information.

Keywords: Policy, Hoaxes, Hate Speeches

How to Cite: Lubis, F. (2020). Analisis Kebijakan Pengendalian Pelaku Hoax dan Ujaran kebencian. *PERSPEKTIF*, 9 (1): 79-86

*Corresponding author:

E-mail: fauziahlubis2018@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN 2541-5913 (online)

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah proses berkelanjutan yang tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi akhir akhir ini adalah globalisasi informasi. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia menjadi bagian masyarakat informasi dunia. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan nasional, perlu adanya respon yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi ini. Salahsatu perubahan yang terjadi adalah peristiwa Cyber crime berupa penyebaran berita-berita palsu melalui media sosial. Cyber crime merupakan jenis kejahatan baru yang lahir karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Septanto, 2018).

Di Indonesia masih banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut mengenai Cyber crime yang sulit untuk diselesaikan seperti penyebaran berita palsu atau yang disebut Hoax dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini di Indonesia sedang marak terjadi (Nugrahaningsih, 2014); (Septian, 2018). Peristiwa ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut.

Saat ini. Survei Mastel 2017 (<http://mastel.id>) mengungkapkan bahwa masyarakat menerima hoax setiap hari lebih dari satu kali. Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah media sosial. Fenomena hoax di Indonesia menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat. Hal ini dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan fitnah dan kebencian (Juditha, 2018). Perkembangan teknologi, masyarakat semakin memudahkan para pelaku penyebar hoax dan ujaran kebencian mendapatkan informasi apa pun dari berbagai aplikasi media sosial.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) mengiringi kebebasan berpendapat di media sosial. Sejak pilpres 2014 lalu, istilah 'hater' pun dikenal luas, yang menandai orang-orang dengan kecenderungan membuat pesan ujaran kebencian pada orang atau kelompok tertentu. Kebhinnekaan sebagai pengikat sosial diuji karena kecenderungan praktik ujaran kebencian yang dipromosikan melalui media sosial. Kondisi itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial seperti

persebaran berita bohong atau informasi palsu (hoax) yang dampaknya menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi. Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat serta menyuarakan pikirannya yang sebelumnya mungkin tidak pernah bisa diungkapkan karena keterbatasan wadah untuk berpendapat.

Kebebasan dalam berekspresi merupakan hak mutlak setiap masyarakat Indonesia yang di cantumkan dalam UUD 1945. Kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu di pertanggungjawabkan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan suatu peristiwa yang saat ini sangat membutuhkan suatu perhatian dan penaggulangan yang tegas, Ketentuan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) belum diatur secara khusus di Indonesia, padahal begitu banyak efek yang ditimbulkan dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), antara lain pengucilan, diskriminasi, kekerasan, sampai yang paling parah yakni pemusnahan terhadap kelompok tertentu/genosida. (Harefa, Syahrin and Mulyadi 2017). Dengan perkembangan teknologi Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pun telah merambah ke media elektronik seperti internet. (Syahrudin (2003); Sitompul (2013); Anam & Hafiz (2015)).

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai situs web bahwa pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang di Indonesia yang 40% nya merupakan pengguna aktif media sosial dari 256,2 juta orang total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 51,8% dari tahun 2014 yang hanya terdapat 88 juta orang saja yang terhubung ke internet atau sebagai pengguna media sosial (Kominfo, 2017). Berdasarkan survey telah didapatkan fakta dan statistik media sosial dari 7,3 miliar penduduk dunia per juli 2015 tercatat hasil " bahwa sebanyak 3,7 miliar pengguna internet, sebanyak 2,3 miliar pengguna media social aktif dengan rata-rata pengguna internet

memiliki 5 akun media sosial, tahun 2016 pengguna media sosial naik 176 juta, dan setiap hari ada 1 juta pengguna media social mobile yang setara dengan 12 orang /detik” (<https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>). Pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun selalu meningkat cukup signifikan, hal tersebut sangat berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong atau hoax yang kian marak diperbincangkan oleh para netter di Indonesia. Pihak yang menyebarkan berita hoax ini memiliki tujuan, salah satunya adalah untuk menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya.

Dalam menyebarkan berita hoax, biasanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu melakukan suatu kebohongan dan menyebarkan informasi yang tidak benar secara sadar. Media sosial merupakan wadah yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita hoax. Banyaknya pengguna aktif bahkan dapat dikatakan sebagai penggila media sosial di Indonesia ini sangat memudahkan pihak penyebar hoax dalam menjalankan aksinya. Kemudahan dalam membuat berita di media cetak maupun media online serta teknologi yang semakin canggih tidak serta-merta membuat orang menghasilkan berita akurat dan terpercaya. Justru kemudahan ini dimanfaatkan oknum untuk membuat berita hoax dengan berbagai kepentingan. Misalnya kepentingan menjatuhkan lawan politik, menaikkan rating pembaca, meraih keuntungan, dll. Celaknya sebagian masyarakat kita dengan mudah percaya dengan berita yang belum jelas kebenarannya, lalu menyebarkan berita itu.

Di Indonesia sendiri, kehadiran media sosial juga memberikan pengaruh terhadap perubahan politik, sosial, budaya dan ekonomi di Indonesia. Media sosial menggeser dan menembus batas dari pola relasi interaksi hirarkis menjadi egaliter, baik di ruang politik maupun budaya. Seorang warga negara biasa secara langsung dapat mengkritik dan berkomunikasi dengan Presidennya cukup hanya dengan mengirim mention ke akun Presiden di Instagram. Informasi yang kurang bahkan tidak bermutu bertebaran secara masif tanpa verifikasi dan konfirmasi. Hoax, fitnah, dan hujatan bersahut-sahutan nyaris tanpa

henti. Berdasarkan informasi dari situs web Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Inonesia, sepanjang tahun 2016 (Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya) telah berhasil memblokir 300 lebih akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi hoax, provokasi, hingga SARA dari 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian yang sedang diawasi pemerintah.

Dalam beberapa kasus yang terjerat Undang-Undang ITE (Purnama 2018) diantaranya: 1) Seorang mahasiswa universitas di Yogyakarta dilaporkan karena menghina masyarakat Yogya melalui akun path. Dijerat pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE. 2) Seorang pemilik akun twitter dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik salah satu anggota DPR akibat tweet yang dibuatnya, 3) Seorang blogger yang mengulas dugaan penyelewengan dana pungutan pada suatu sekolah, dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE oleh komite sekolah. 4) Seorang pasien rumah sakit, mengeluhkan pelayanan rumah sakitnya melalui surat elektronik. Kemudian surat tersebut tersebar ke mailing list. Pihak rumah sakit menjerat pasien dengan pencemaran nama baik dengan UU ITE. 5) Seorang dosen, yang menyebarkan video pidato Gubernur melalui media sosial, dijerat pasal 28 ayat (2) UU ITE. Yaitu, mengenai penyebaran informasi kebencian, permusuhan individu berdasarkan SARA. 6) Gubernur Jakarta, dijerat pasal 28 ayat (2) UU ITE, mengenai penyebaran informasi bermuatan SARA akibat tersebarnya video pidato yang mengandung penistaan agama. 7) Seorang guru SD terjerat UU ITE setelah menulis komentar di facebook dengan nada penghinaan. Melanggar pasal 27 (3) (Penyebaran informasi bermuatan penghinaan).

Kasus-kasus diatas menggambarkan bahwasanya dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial yang dapat menjerat seseorang dalam kasus tindak pidana, sehingga masyarakat diharapkan mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan kegaduhan dan perang virtual. Pemerintah telah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum, sehingga teknologi informasi dapat

dimanfaatkan tanpa disalahgunakan. Infrastruktur hukum ini dibuat dengan memperhatikan nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia berupa Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi Undang-undang ITE sudah mengarah kearah yang positif sejak diberlakukan pertama kali tahun 2008. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut dengan UU ITE) adalah undang undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum.

Undang undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik sebagai pengguna, maupun pengembang.

Beberapa pertimbangan pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut; 1) Sebuah respon atas perubahan di masyarakat, 2) Pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan bangsa, 3) Perbuatan hukum baru akibat teknologi, 4) Mencegah penyalahgunaan dan 5) Melaksanakan Undang Undang Dasar 1945.

Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang, dalam undang undang ini. Namun demikian, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya terhadap dampak penyalahgunaan media sosial tersebut. Jika kita berkaca dalam situasi saat ini menjelang pemilihan presiden sangat rentan sekali terjadinya pelanggaran Undang-Undang ITE, khususnya yang berbaur SARA. Dengan adanya undang-undang ini, keadilan dapat lebih ditegakkan.

Namun demikian, beberapa kelemahan dari UU ITE, selama ini dijadikan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat. Pasal pencemaran nama baik sering digunakan untuk menjerat seseorang. Selain itu, bukti dokumen elektronik memiliki potensi untuk dipalsukan. Pemalsuan bukti dokumen elektronik merupakan kelemahan dari UU ITE, mengingat UU ITE menganggap dokumen elektronik merupakan bukti hukum yang sah. Mengingat kondisi dan fenomena yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi Undang-Undang ITE Dalam Mencegah Tindak Pidana Hoax dan Ujaran Kebencian.

METODE PENELITIAN

Jenis Metode yang digunakan adalah Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. (Fajar & Ahmad, 2010). Pada penelitian ini data sekunder sebagai sumber informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Spesifikasi penelitian ini di khususkan untuk menganalisis terhadap implementasi Undang-undng yakni penelitian terhadap kaedah-kaedah dan perilaku hidup di dalam masyarakat. Metode pendekatan, kebijakan yang akan diterapkan yaitu menganalisis Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*) (Ediwarman, 2015). Penelitian kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang ditaati masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan berfokus pada data sekunder yaitu terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkenaan dengan penelitian ini (Lubis, 2012).

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan studi pustaka (*Library Research*). Teknik analisis data dilakukan dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul. Proses analisis hukum dihubungkan dengan kerangka teori untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang diteliti.

Metode yang digunakan dengan Analisis Data Model Miles and Humberman yang dijabarkan dalam empat tahap yakni sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data, Pengumpulan Data merupakan upaya untuk mengumpulkan data, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya; 2) Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemulihan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama meneliti untuk memilih informasi yang dianggap menjadi pusat perhatian penelitian di lapangan; 3) Penyajian Data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan/pengambilan tindakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pengaturan penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian yang telah diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2 sudah berjalan efektif karena dapat membatasi ruang gerak para pelaku penyebar berita hoaks dan ujaran kebencian. Lebih khusus, pelaku bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*Hate Speech*). Ketentuan Pasal 45 di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

(2) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

(3) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).* (4) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau*

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal-Pasal di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana yang dilarang oleh UU-ITE ini merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal-pasal dalam UU-ITE di atas, sesuai dengan makna tindak pidana kejahatan, dengan tegas diatur bahwa tindak pidana di bidang ITE ini dilakukan dengan suatu "kesengajaan". Hal ini membawa konsekuensi bahwa pelaku tindak pidana di bidang ITE memang mengetahui dan/atau menghendaki atas apa yang dia lakukan. sesuai dengan karakteristik tindak pidana di bidang ITE. Melihat pasal-pasal dalam UUIITE, tepat sekali menempatkan tindak pidana di bidang

ITE merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun tidak ada laporan dari masyarakat, jika ada dugaan atau sangkaan sedang, akan dan sudah terjadi tindak pidana di bidang ite, maka aparat penyelidik dan penyidik dapat langsung melakukan pemrosesan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. mereka tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat.

Khusus pasal 45 ayat (3) berdasarkan pasal 45 ayat (5) merupakan tindak pidana aduan. hal ini sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 50/puu-vi/2008 5. stelsel pidananya merupakan "pidana alternatif kumulatif", hal ini nampak dengan diaturnya "pidana penjara dan/atau pidana denda. Ketentuan pidana di bidang ITE (UU 11/ 2008 jo UU 19/2016) menjelaskan bahwa setiap orang yang ancaman pidana 45 (1) (2) sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar: kesusilaan, perjudian dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. Selanjutnya Pasal 45 (3) menyebutkan bahwa setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pidana catatan: a. berdasarkan pasal 45 ayat (5), merupakan tindak pidana aduan. Hal ini sesuai dengan putusan mk 50/puu-vi/2008 maka sanksi yang diberikan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak rp750.000.000.

Dalam implementasinya Undang-Undang ini masih belum dapat dipahami oleh semua masyarakat sehingga masih perlu melakukan sosialisasi yang berkesinambungan. Mengingat maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan media sosial. Namun dalam praktiknya Undang-undang ini sudah berjalan maksimal karena mampu membatasi ruang gerak para pelaku penyebar hoax dan ujaran kebencian. Perlunya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional. Harapannya, pembangunan teknologi

informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimanfaatkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional serta mendukung perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum, sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan tanpa disalahgunakan. Infrastruktur hukum ini dibuat dengan memperhatikan nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Meskipun setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan dalam menggunakan informasi (seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya), undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa hak tersebut tetap harus dibatasi agar menghormati hak dan kebebasan orang lain jua. Sebagaimana tercantum dalam pasal 28 J ayat 2.

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Pengelolaan informasi merupakan sesuatu yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan UUD 1945, hal ini perlu dikontrol oleh negara untuk kemaslahatan orang banyak. Jangkauan undang undang ini tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Siapa saja dan dimana saja pihak tersebut, jika pihak tersebut melakukan sesuatu aktivitas (mengenai informasi dan transaksi telektronik) yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia, pihak tersebut dapat terjerat UU ITE ini. Hal ini mengingat pemanfaatan teknologi yang bersifat lintas teritorial / universal. Beberapa definisi mengenai "merugikan kepentingan Indonesia" dijelaskan pada bagian penjelasan UU ITE , yaitu : 1) Merugikan kepentingan ekonomi nasional 2) Perlindungan data strategis 3) Harkat dan

martabat bangsa 4) Pertahanan dan keamanan negara 5) Kedaulatan negara, warga negara, badan hukum Indonesia.

Menurut undang undang ITE, informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah (dengan pengecualian untuk beberapa surat tertentu yang dinyatakan dalam undang undang, surat tersebut harus dalam bentuk tertulis). Beberapa surat yang menjadi pengecualian, antara lain: 1) surat berharga 2) surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, administrasi negara. Setiap orang dapat menyatakan hak, memperkuat hak yang sudah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan informasi elektronik tersebut. Namun ia harus menjamin bahwa informasi elektronik itu sah dan memenuhi syarat, yaitu dapat: diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sejalan dengan pendapatnya (R.Harefa, Syahrin and Mulyadi 2017) Kebebasan dalam berekspresi merupakan hak mutlak setiap masyarakat Indonesia yang di cantumkan dalam UUD 1945. Kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu di pertanggungjawabkan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan suatu peristiwa yang saat ini sangat membutuhkan suatu perhatian dan penaggulangan yang tegas, Ketentuan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) belum diatur secara khusus di Indonesia, padahal begitu banyak efek yang ditimbulkan dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), antara lain pengucilan, diskriminasi, kekerasan, sampai yang paling parah yakni pemusnahan terhadap kelompok tertentu/genosida.

UU ITE telah mengakomodir ketentuan material dan juga prosedural. Dengan demikian UU ITE memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas melalui Sistem Elektronik. Tetapi secara khusus, menurut hemat peneliti pelanggaran kejahatan di bidang ITE masih tetap cukup tinggi baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan pengaruh

UU ITE sejak diundangkan dengan penurunan jumlah pelanggaran tidak signifikan terlihat. Dari Kejaksaan menyampaikan mengenai pengaruh UU ITE terhadap peningkatan atau penurunan pelanggaran di bidang ITE adalah seharusnya penerapan UU ITE saat ini berpengaruh terhadap penurunan pelanggaran di bidang ITE namun untuk memperoleh jawaban yang akurat maka seharusnya dilakukan penelitian untuk meneliti efektif tidaknya penerapan undang-undang tersebut.

Peristiwa penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat di sikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi netter yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita atau pun informasi yang tersebar. Selain itu juga masyarakat harus mampu memhami dampak negative yang terjadi ketika menggunakan media sosial sehingga tidak terjerat dalam Undang-Undang ITE. Disamping itu, semakin pesat dan berkembangnya teknologi digital dewasa ini, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon hoax yang beredar dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi dimasyarakat dan Pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana dan kiranya media sosail dan internet digunakan untuk kebaikan. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2 sudah berjalan maksimal karena dapat membatasi ruang gerak para pelaku penyebar berita hoaks dan ujaran kebencian. Lebih khusus, pelaku bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga daat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*Hate Speech*).

SIMPULAN

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2 sudah berjalan efektif karena dapat membatasi ruang gerak para pelaku penyebar berita hoaks dan ujaran kebencian. Lebih khusus, pelaku bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*Hate Speech*). Disamping itu, semakin pesat dan berkembangnya teknologi digital dewasa ini, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (Hoax) yang sedang marak terjadi. Sebanyak 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M.C. & Hafiz, M. (2015). Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, 2015.
- Ediwarman, (2015). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Medan: PT. Sofmedia, <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>.
- Fajar, M. & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kominfo, (2017). Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta: Kominfo
- Lubis, S.M. (2012). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Jakarta: PT Sofmedia
- Juditha, (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, 31-44.
- Nugrahaningsih, W. & Utami, I.W. (2014). Implementasi Penyelesaian Cybercrime dengan Dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Implementasi Penyelesaian Cybercrime di Surakarta. 7:2
- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1-3 tentang Pedoman.
- Rahmawati, N., Syahrin, A & Mulyadi, M. (2017). Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). *Jurnal Mahupiki*, Vol 1, No 01
- Septian, H. (2018). Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Kalbiscentia*, Volume 5 No. 2
- Sitompul, J. (2013). Penanganan Cyber Crime di Indonesia
- Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
- Survey Hoax Masyarakat Telematika Indonesia tahun 2017, <https://mastel.id>
- Syahrudin, H. (2003). Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara
- UU No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis